

ABSTRAK

Kehadiran toko modern yang berkembang pesat pada wilayah Kota Semarang, berdasarkan aspek persaingan dinilai memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam memberikan alternatif tempat belanja yang disertai dengan sejumlah fasilitas untuk menunjang kenyamanan konsumen dalam berbelanja, keragaman barang dan harga tetap. Manfaat investasi toko modern juga dirasakan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam mengembangkan wilayah kota, peningkatan penerimaan pendapatan daerah dan penyerapan tenaga kerja. Namun, pertumbuhan investasi toko modern yang tidak terkontrol dan kurang memperhatikan jarak serta kondisi sosial ekonomi pasar tradisional dikhawatirkan berpotensi mengganggu iklim persaingan usaha yang sehat pada perdagangan domestik di Kota Semarang. Dalam rangka mengantisipasi semakin tidak terkendalinya persebaran ekspansi toko modern, maka Pemerintah Kota Semarang menerbitkan Peraturan Daerah No.1 tahun 2014 tentang Penataan toko Modern. Dalam praktek penegakan Perda No.1 tahun 2014 tentang penataan toko modern terjadi ketidaksesuaian dengan tujuan yang ingin dicapai, hal tersebut terlihat dari sejumlah pelanggaran yang ditemukan oleh Dinas Perindustrian dan perdagangan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji, (1) tujuan internalisasi Peraturan Daerah No.1 tahun 2014 tentang Penataan Toko Modern terhadap kondisi persaingan usaha antara toko modern dan pasar tradisional pada sektor perdagangan di Kota Semarang. (2) implementasi penegakan Peraturan Daerah Kota Semarang No.1 tahun 2014 dan implikasinya terhadap iklim persaingan usaha antara toko modern dan pasar tradisional, serta memberikan solusi penataan dan penegakan peraturan pengendalian investasi toko Modern untuk mewujudkan keseimbangan iklim persaingan usaha dengan pasar tradisional melalui studi banding di Kota Surakarta.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah *Socio Legal* yaitu metode penelitian hukum secara empiris dengan mengkombinasikan peraturan hukum, konsep dan teori-teori dari berbagai disiplin ilmu untuk mengkaji fenomena hukum yang tidak terlepas dari konteks sosial. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, serta data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang kemudian akan dianalisis menggunakan metode analisa kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Urgensi internalisasi kebijakan pengendalian iklim persaingan usaha dalam Peraturan Daerah No.1 tahun 2014 bertujuan untuk: **Pertama**, menciptakan harmonisasi dan keseimbangan peran (*equal playing field*) antara pelaku usaha toko modern dan pedagang pasar tradisional pada kegiatan perdagangan domestik di kota Semarang yang dilandasi dengan prinsip demokrasi ekonomi. **Kedua**, Sarana pengendalian dampak negatif atas tidak terkontrolnya ekspansi investasi toko modern dan pencegahan penyalahgunaan keunggulan kekuatan pasar yang dimiliki oleh pelaku usaha toko modern yang berpotensi menimbulkan iklim persaingan usaha yang tidak sehat. (2) Implementasi Perda Kota Semarang No.1 tahun 2014 belum dapat berjalan dengan baik, dikarenakan masih terdapat pelanggaran-pelanggaran seperti banyak toko modern yang beroperasi tanpa disertai Izin Usaha Toko Modern (IUTM), pendirian toko modern kurang dari 500 meter dari pasar tradisional sesuai jarak minimal sesuai yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan daerah dan semakin menjamurnya toko modern minimarket tiap tahunnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas penegakan Perda Penataan Toko Modern antara lain : **Pertama**, adanya ketentuan pengecualian dalam perda terhadap pendirian toko modern minimarket yang diwajibkan melakukan kajian sosial ekonomi dan dampak lingkungan yang menimbulkan semakin merebaknya minimarket di Kota Semarang. **Kedua**, ketidaktegasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan selaku instansi pembina dan pengawas dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran zonasi dan perizinan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha minimarket dengan alasan kekhawatiran mengganggu iklim investasi yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam Rencana Pembangunan Daerah. **Ketiga**, banyaknya oknum pelaku usaha toko modern berbentuk minimarket yang enggan mengurus Izin Usaha Toko Modern (IUTM), dikarenakan prosedur pengajuan IUTM harus melewati sejumlah mekanisme perizinan prinsip dan studi kelayakan dampak lingkungan (AMDAL) yang sangat rumit serta membutuhkan jangka waktu panjang. Hal tersebut dinilai oleh pelaku usaha sebagai penghambat investasi (3) Hasil studi banding di wilayah Kota Surakarta menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan toko modern relatif terkontrol dalam kurun waktu beberapa tahun. Hal tersebut

disebabkan oleh konsistensi Pemerintah Kota Surakarta dalam menegakan Peraturan Daerah Kota Surakarta No.5 tahun 2011 dalam menindak setiap pelanggaran atas ketentuan regulasi tersebut. Saran yang diberikan oleh penulis terhadap pembenahan kebijakan pengendalian investasi toko modern anatar lain: revisi ketentuan pasal 8 yang memberikan pengecualian kewajiban melakukan kajian sosial ekonomi pada pendirian minimarket, pembenahan pendataan toko modern antar instansi dan penerpaan kebijakan moratorium pendirian minimarket di Kota Semarang.

Kata kunci :Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang No.1 tahun 2014, perdagangan dalam negeri , Toko Modern, Pasar Tradisional , Persaingan Usaha Yang Sehat

ABSTRACT

The existence of modern retailer that grow rapidly in the city of Semarang, based on the aspect of competition is considered to give a positive impact for the community in providing alternative shopping spots accompanied by a number of facilities to support the convenience of consumers in shopping, diversity of goods and fixed prices. The benefits of modern store investment are also felt by Semarang City Government in developing urban areas, increasing revenue and labor absorption, however, the uncontrolled growth of modern store investment and lack of attention to the distance and socio-economic conditions of traditional markets is feared to potentially disrupt the competitive business climate Healthy in domestic trade in Semarang City. In order to anticipate the unbridled distribution of modern store expansion, Semarang City Government issued Local Regulation No.1 year 2014 on the arrangement of Modern shop. The inconsistency between the enforcement of Regional Regulation No.1 of 2014 on the arrangement of modern stores has not been in accordance with the objectives to be achieved, as evidenced by a number of violations by Semarang Regional Department of the Industry and Trade .

This research aims to analyze and review, (1) the purpose of internalization of Regional Regulation No.1 of 2014 on the Arrangement of Modern Retailer in Semarang city towards the condition of business competition between modern retail and traditional markets in the trade sector in Semarang City. (2) enforcement implementation of Semarang City Regulation No.1 year 2014 and its implication to business competition climate between modern shop and traditional market, as well as providing solution of arrangement and enforcement of Modern Store's investment control regulation to create a balance of business competition climate with traditional market through comparative study In Surakarta City.

The research method used in the writing of this thesis is Socio Legal is a method of legal research empirically by combining legal regulations, concepts and theories from various disciplines to study the legal phenomena that can not be separated from the social context. The data used in this study are Primary Data obtained through in-depth interviews with key informants, as well as secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, which will then be analyzed using qualitative analysis methods.

The result of the research shows that: (1) The internalization of the policy of business competition climate control in Regional Regulation No.1 year 2014 aims to: First, create harmonization and equal playing field between modern shopper and trader of traditional market in trading activity Domestic in the city of Semarang which is based on the principles of economic democracy. Second, the means of controlling the negative impact on the uncontrolled expansion of modern store investment and the prevention of abuse of market power advantage possessed by modern store business actors that potentially lead to unhealthy business competition climate. (2) Implementation of City Regulation of Semarang No.1 year 2014 has not been able to run well, because there are still violations like many modern stores that operate without the Modern Retail Business License (MRBL), the establishment of a modern store less than 500 meters from the traditional market based to the minimum distance which is formulated in article 8 of regional regulations and uncontrolly the growth of mini market every year. Factors affecting the effectiveness of the enforcement of the Regulation of Modern Retailer Restraint include: First, the provision of exclusion in the local regulation on the establishment of modern minimarket shops that are required to conduct socio -economic studies and environmental impacts that cause the increasingly spread minimarket in Semarang City. Secondly, the indecisiveness of the Industry and Trade Department as the supervisory and supervisory agencies in imposing sanctions on zoning violations and business licenses conducted by minimarket entrepreneurs on the grounds of concerns disturb the investment climate proclaimed by the Government of Semarang City in the Regional Development Planning . Third. The number of unscrupulous actors in the form of minimarkets who are reluctant to take care of Modern Retail Business License (MRBL), because the procedure of MRBL submission must pass a several of principle licensing mechanism and environmental impact feasibility study (EIA) which is very complicated and requires long term. It was assessed by business actors as an obstacle to investment. (3) The results of comparative studies in the Surakarta region showed that the growth rates of modern stores are relatively controlled within a few years. This is caused by the consistency of the Government of Surakarta City in enforcing Surakarta City Local Regulation No.5 of 2011 in cracking down any violation of the provisions of

the regulation. Suggestions given by the author to evaluation modern retail investment control policy are : revision of the provisions of article 8 which provides exemption of obligation to conduct socio-economic studies on minimarket establishment, revamping of modern store data management between agencies and moratorium policy adoption of minimarket establishment in Semarang City

Keyword:Implementation of Semarang City Regional Regulation No.1 year 2014, Domestic trade, Modern Retail , Traditional Market, Fair Business Competition